MENINGKATKAN GAIRAH USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN PERANTARA EKSTERNAL DAN MENGEMBANGKAN POTENSI INTERNAL

Oleh

Azmen Kahar¹, Rika Septrizarty², Asrul Mulyadin³, Meci Nilam Sari⁴, Dabitha Wise Maliha⁵
^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah

E-mail: ¹azmen.kahar@stiaadabiah.ac.id

Article History:

Received: 07-06-2022

Revised: 15-06-2022

Accepted: 24-07-2022

Keywords:

UMKM, Potensi Internal,

Perantara Eksternal

Abstract: Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan mengedepankan pihak eksternal dan potensi internal. Pengembangan internal kelompok usaha untuk meningkatkan potensinya dengan menggunakan modal benih dengan simpanan sendiri, inovasi produksi, perluasan jaringan pemasaran, dan penyempurnaan sarana dan prasarana usaha. Selain itu, dengan pendanaan dari pihak luar dan Dinas UMKM Kota Sawahlunto, UMKM memberikan akses sumber pendanaan, pembinaan dan pelatihan, melakukan kegiatan promosi produk dan pemasaran produk, diperluas dengan menyediakan sarana dan prasarana. Namun, beberapa pengusaha terkendala oleh kenaikan harga produk, keterbatasan tenaga, masalah permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Eksistensi UMKM saat ini tidak dapat disingkirkan atau dihindari dari masyarakat nasional. Keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal membagi pendapatan masyarakat. Selain itu dapat menciptakan kreativitas yang sejalan dengan upaya melestarikan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM yang menggunakan teknik padat karya, sederhana dan mudah dipahami dapat menjadi wadah praktis bagi masyarakat.

Program pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai sarana peningkatan daya beli masyarakat pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dalam menghadapi krisis mata uang. Pengembangan UMKM merupakan mesin penggerak perekonomian nasional yang sangat strategis, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua bidang usaha, dan kontribusi UMKM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah sangat besar.

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini bukan hanya langkah yang harus dilakukan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. UMKM sendiri sebagai insider under development dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengambil tindakan.

Potensi mereka adalah fasilitas yang disediakan pemerintah dapat digunakan untuk menciptakan kreativitas bisnis.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan mengedepankan pihak eksternal dan potensi internal.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam Bab 1 dan 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil (UMKM), yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Berdasarkan pengertian di atas, usaha mikro, kecil pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh seorang atau satu kesatuan usaha yang memenuhi standar usaha mikro kecil.

B. Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sama halnya dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan sumber daya manusia berdasarkan Pasal 16 (1) (c) akan dilakukan dengan cara:

1. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Ketiga aspek tersebut mengartikan bahwa sumber daya manusia merupakan isu terpenting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah untuk menciptakan wirausahawan yang mandiri masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus diberdayakan untuk meningkatkan kualitas bakatnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kepentingan masyarakat.

C. Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dengan mengacu pada definisi kesejahteraan Howard Jones (1990) tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk mengentaskan kemiskinan dalam berbagai

kondisi. "Menyediakan kesejahteraan sosial berarti, pertama dan terutama, mengurangi kemiskinan di antara banyak gejalanya." Yang dimaksud dengan "kemiskinan dalam berbagai bentuk" adalah bahwa masalah kemiskinan di sini bukan hanya "kemiskinan fisik" seperti pendapatan rendah (bukti pendapatan) dan rumah tidak layak huni, tetapi juga berbagai masalah sosial terkait seperti jalanan. Kemampuan dan efektivitas anak, pekerja anak, perdagangan manusia, prostitusi, pekerja migran, kebodohan, isu keterbelakangan, dan lembaga sosial negara dan swasta terkait (LSM, organisasi sosial, lembaga lokal).

METODE

A. Jadwal Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksana pengabdian bersama Dinas terkait Kota Sawahlunto mengunjungi secara langsung UMKM di daerah Sawahlunto.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar para warga masyarakat di wilayah Sawahlunto mengetahui potensi internal yang mereka miliki dan mampu mengembangkan potensi tersebut.

C. Manfaat Kegiatan

Diharapkan dengan adanya pengabdian ini, masyarakat mampu mengetahui potensi daerah yang mereka miliki dan mampu mengembangkan potensi tersebut ke tahap optimal.

D. Metodologi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana selain menganalisa, kami melakukan pemberian materi-materi "cara meningkatkan potensi internal UMKM".

Selain itu, analisis data untuk pengabdian ini dilakukan dalam empat tahap, menurut Miles dan Huberman (1984) dari Suprayogo dan Tobroni (2001, hlm. 192).

1. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan data mentah yang muncul dari catatan lapangan dan mengubahnya dengan fokus pada penyederhanaan.
3. Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks cerita, yang didukung dengan metrik, grafik, jaringan, tabel, dan bagan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan berarti mencari makna, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, jalur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan diambil secara cermat melalui validasi berupa tinjauan catatan lapangan dan validasi data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Usaha Kecil Dan Menengah (Umkm) Dengan Perantara Eksternal Dan Mengembangkan Potensi Internal

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik

sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh PBB dalam (Luz. A. Ein- siedel, 1968, h. 9), bahwa: “pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan meng- integrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.”

a. Pengembangan Secara Internal

Adapun potensi dan pengembangan yang perlu dilakukan adalah:

1. Pengadaan permodalan
2. Inovasi hasil produksi
3. Perluasan jaringan pemasaran
4. Pengadaan sarana dan prasarana produksi

b. Pengembangan eksternal dengan dukungan Dinas UMKM di Sawahlunto

Peran pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tentunya sangat diperlukan. UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan sumber daya manusia untuk menyediakan sarana dan prasarana. Selain itu, keberadaan UMKM memiliki banyak keunggulan. Singkatnya, UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. “Kesejahteraan sosial, tujuan mulia yang harus dicapai oleh sektor publik, jelas membutuhkan tata kelola yang baik. Saat ini ada tuntutan yang meningkat pada negara untuk memungkinkan realisasi yang cepat dari hasil bantuan sosial” (Keban, 2008, hlm. 17-18). Dalam hal ini peran Dinas UMKM Kota Sawahlunto merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk membantu mengikis permasalahan yang terjadi dalam pengembangan UMKM.

1. Pengadaan Pembinaan dan Pelatihan

Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas UMKM Kota Sawahlunto merupakan bentuk pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya serta dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mereka yang ingin memulai usaha sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM, Pelayanan UMKM Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan berupa Klinik UMKM. Di Klinik UMKM, calon dan pengusaha UMKM yang masih mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya bias mendapatkan konsultasi perencanaan dan pengembangan usaha.

2. Peningkatan Promosi produk

Promosi produk-produk UMKM sangat wajib dilakukan agar produk-produk UMKM dari Kota Sawahlunto bisa dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai instansi daerah lain maupun dari pemerintah pusat. Banyak cara promosi yang dapat dipakai pemerintah kota Sawahlunto seperti mengikuti setiap kegiatan UMKM baik itu provinsi maupun pusat

3. Pemberian akses UMKM terhadap Sumber-Sumber Permodalan

Usaha mikro kecil dan menengah umumnya mengandalkan modal untuk menjalankan bisnis mereka dan dapat mengalami kesulitan dengan menahan rentenir karena akses yang tidak memadai ke sumber pendanaan formal. Dalam hal penyediaan akses sumber

pendanaan, Dinas UMKM Sawahlunto telah memberikan akses permodalan bagi masyarakat. Dana yang diberikan berasal dari Pemerintah Pusat dan provinsi Sumbar.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dinas UMKM kota Sawahlunto menyediakan sarana dan prasarana dengan menyediakan ruang pelatihan bagi individu yang ingin berbisnis. Di bidang pemasaran, Dinas UMKM kota Sawahlunto bekerjasama dengan UMKM di kota lain untuk melakukan kegiatan seperti bazar dan pameran produk UMKM. Fasilitas sebagai pusat konseling bagi masyarakat yang memiliki masalah bisnis, seperti penyediaan layanan klinik UMKM yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Fasilitas yang ada harus difungsikan dan ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang fungsi klinik UMKM yang disponsori pemerintah dan menggunakannya dengan bijak.

Kendala dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Naiknya Harga Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan dasar yang digunakan untuk mengolah bahan tertentu menjadi produk yang dapat diproduksi dengan kreativitas dan inovasi yang maksimal. Tidak mengherankan, kenaikan harga sumber daya ini mempengaruhi harga jual, dan karena sumber daya bersumber dari inventaris, harganya lebih mahal daripada pengadaan sumber daya dari kebun mereka sendiri. Hal ini menjadi kendala karena mereka hanya menyediakan bahan baku dengan anggaran terbatas. Meski permintaan pasar cukup signifikan, produksi yang dihasilkan otomatis terbatas.

b. Masalah modal

Modal merupakan faktor terpenting dalam memulai suatu usaha. Mengingat UMKM merupakan usaha rumahan yang mengandalkan modal sendiri, modal ini membutuhkan dukungan pemerintah.

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, sarana dan prasarana untuk melakukan usaha harus didukung. Seperti sarana pemasaran suatu produk atau sarana pembuatan suatu produk.

d. Perluasan Pemasaran Produk

Persaingan dalam pemasaran produknya adalah hal yang wajar. Oleh karena itu dituntut perlu kreativitas pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang beranekaragam dan mampu menarik minat pembeli yang luas.

PENUTUP

Kesimpulan

a. Pengembangan internal untuk meningkatkan potensi dan kemajuan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Perlunya ada permodalan dalam memulai UMKM di Sawahlunto
2. Inovasi produk untuk membangkitkan minat masyarakat sebagai konsumen. Menghadirkan inovasi dalam produksi dengan menawarkan berbagai varian rasa sehingga masyarakat bias memilih sesuai selera tanpa merasa bosan.
3. Perlunya perluasan jaringan pemasaran dari pengusaha UMKM baik secara offline maupun secara online agar produk UMKM mampu menyentuh seluruh masyarakat Indonesia.

4. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana produksi di Kota Sawahlunto. Pengadaan ini sebagai penunjang dalam kegiatan produksi.

b. Pengembangan secara eksternal dengan adanya bantuan dari Dinas UMKM Kota Sawahlunto, diantaranya:

1. Dinas UMKM Kota Sawahlunto telah memberikan akses permodalan kepada pengusaha yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
2. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Dinas UMKM Kota Sawahlunto bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.
3. Dalam meningkatkan pemasaran produk, Dinas UMKM Kota Sawahlunto telah membantu dalam mempromosikan produk UMKM dengan cara mengadakan pameran atau bazar secara gratis bagi pengusaha UMKM Kota Sawahlunto
4. Dinas UMKM kota Sawahlunto menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kemajuan UMKM, antara lain: memberikan fasilitas gratis bagi mereka yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan dan pameran promosi produk yang disponsori pemerintah.

c. Kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya yaitu:

1. Harga komoditas sering naik turun, sehingga harga komoditas naik
2. Karena masalah permodalan, sebagian besar UMKM belum mengalami program dukungan permodalan pemerintah, dan beberapa pengusaha tidak mengharapkan dukungan karena mengelola pinjaman modal memerlukan beberapa kondisi yang mungkin dianggap tidak efisien.
3. Kurangnya akses pemasaran produk, yaitu adanya persaingan pemasaran

Saran

1. Pengusaha wajib meningkatkan kreativitas, potensi, dan menambah wawasan, pengalaman, dan pelatihan yang didukung pemerintah untuk membantu bisnis mereka bersaing dengan pasar internasional dan manajemen keuangan di mana sistem tradisional masih digunakan, perlu dikembangkan.
2. Perlu sosialisasi yang adil dan UMKM Sawahlunto memiliki akses informasi sebanyak-banyaknya tentang program dan layanan pemerintah, khususnya layanan UMKM Kota Sawahlunto yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan UMKM Sawahlunto. Semua masalah yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran dengan berpartisipasi dalam program pemerintah.
3. Dinas UMKM Kota Sawahlunto perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas sumber daya produktivitas yang lebih inovatif dalam pembuatan produk UMKM dan memberikan jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasarnya.
4. Pemerintah tidak hanya perlu memfasilitasi akses permodalan bagi para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya, tetapi juga meningkatkan sarana dan prasarana tersebut.
5. Dinas UMKM Sawahlunto perlu memperbaharui jumlah UMKM di seluruh Sawahlunto untuk memfasilitasi pemberian pelatihan sesuai klasifikasi industri.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Einsiedel, Luz, A. (1968) Success and Failure of some Community Development in Batanggas. University of the Philippines. A Community Development Research Council Publication.
- [2] Jones, Howard (1990), Social Welfare in Third World Development, London: MacMillan
- [3] Keban, Yaremis T. (2008) Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu, Jakarta. Gavamedia.
- [4] Suprayogo, Imam, dan Tobroni (2001) Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung, Remaja Rosdakarya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN